

Kontribusi sektor pengadaan gas dan listrik terhadap produk domestik regional bruto

Rahmadani^{1✉}, Ramli S², Abdul Halim³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Mamuju.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi sektor pengadaan gas dan listrik terhadap produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mamuju. Penelitian ini menggunakan Menurut Arikunto (2014:63) metode analisis data pada penelitian kuantitatif menggunakan rumus kontribusi untuk mengetahui perbandingan sektor unggulan sektor pengadaan gas dan listrik terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam kurun waktu lima tahun terakhir sejak tahun 2018 sampai dengan 2022. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi sektor pengadaan gas dan listrik terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Mamuju Tahun 2018 – 2022, diama tahun 2018 berkontribusi sebesar 49,00%, tahun 2019 berkontribusi sebesar 46,58%, tahun 2020 berkontribusi sebesar 51,28%, tahun 2021 berkontribusi sebesar 46,88%, dan tahun 2022 berkontribusi sebesar 47,53%

Kata kunci: Kontribusi; sektor; PDRB

Contribution of gas and electricity procurement sector to gross regional domestic product

Abstract

The purpose of this study was to determine the contribution of the gas and electricity procurement sector to the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Mamuju Regency. This study uses according to Arikunto (2014: 63) the method of data analysis in quantitative research using the contribution formula to determine the comparison of the leading sectors of the gas and electricity procurement sector to the Gross Regional Domestic Product (GRDP) in the last five years from 2018 to 2022. The results showed that the contribution of the gas and electricity procurement sector to the gross regional domestic product (GRDP) of Mamuju Regency in 2018 - 2022, in 2018 contributed 49.00%, in 2019 contributed 46.58%, in 2020 contributed 51.28%, in 2021 contributed 46.88%, and in 2022 contributed 47.53%..

Key words: Contribution; Sector; GRDP

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan perkapita penduduk yang diikuti oleh perubahan struktur ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi dapat dilihat berdasarkan struktur kenaikan produksi dan penyerapan tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Selain itu pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi (economy growth), dimana keduanya memiliki hubungan saling keterkaitan. Artinya pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2011:27).

Sumber penerimaan daerah dari sektor retribusi dan pajak ternyata masih banyak daerah yang belum menyusun prakiraan potensi penerimaan pajak daerah dengan baik. Target penerimaan pajak daerah seringkali disusun berdasarkan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, tanpa membedakan jenis, tingkat kepastian potensi suatu objek pajak, atau akurasi angka-angka target tahun sebelumnya, sehingga tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Sektor pengadaan gas dan listrik merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang masuk pada hitungan Produk Domestik Bruto (BDRB) yang potensial di Kabupaten Mamuju sehingga realisasi kemungkinan lebih besar dari target, semakin tinggi tingkat penerimaan pajak, maka semakin tinggi kemampuan daerah membiayai pembangunan, namun semakin rendah penerimaan sektor pengadaan gas dan listrik maka semakin rendah pula kemampuan daerah membiayai pembangunan.

Terkait pemungutan sektor pengadaan gas dan listrik bagian dari pajak penerangan jalan terhadap seluruh pengguna tenaga listrik pada saat sekarang sudah ada perkembangan dan inovasi yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yaitu penggunaan tenaga listrik dengan sistem listrik Prabayar, listrik Prabayar mengharuskan pengguna tenaga listrik membayar terlebih dahulu kWh listrik yang hendak dipakai. Caranya adalah dengan membeli pulsa listrik di (token) penyedia listrik Prabayar.

Penerimaan sektor pengadaan gas dan listrik Kabupaten Mamuju sebenarnya masih dapat terus dioptimalkan dengan meningkatkan perpajakan. Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan sektor pengadaan gas dan listrik, sehingga membuat wajib pajak merasa puas dan senang atas apa yang dilayani dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara sukarela. Sektor pengadaan gas dan listrik mendorong wajib pajak untuk terus meningkatkan kewajibannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengertian Ekonomi Pembangunan

Menurut Siahaan (2013:2) “ekonomi pembangunan adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita riil mengalami kenaikan dalam jangka panjang atau jika laju pembangunan lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk sehingga pendapatan per kapita riil meningkat”. Menurut Sirojuzilam (2018:16) mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran konteks pertumbuhan ekonomi, dan menurut Arsyad (2014:107) “pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan”

Pengertian Pajak dan Pajak Daerah

Menurut Herschel (dalam Zain, 2012:11) Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diterapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Menurut Feldman (dalam Halim, 2014:10) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa ada kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Soemitro (2014:21) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Sambodo (2014:4) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Penerangan Jalan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 28, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum dan rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Menurut Ahmad (2018:56) dalam Nurzanah menyatakan bahwa pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Menurut Siahaan (2015:409) objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. Kurniawan dan Purwanto (2012:74) mengemukakan objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Sektor Pengadaan Gas dan Listrik

Pemerintah semaksimal mungkin sektor pengadaan gas dan listrik dengan melakukan pembangunan baik yang akan dilaksanakan maupun yang telah terlaksana dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, agar terciptanya lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang menganggur, serta terciptanya pemerataan hasil pembangunan tersebut (Elfindri, 2019:28). Semua ini berhasil karena ada perencanaan sebelumnya yang didukung berbagai informasi, data, serta indikator ekonomi. Terdapat beberapa parameter yang dipakai sebagai pengukur keberadaan pembangunan daerah yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan masyarakat, penambahan lapangan kerja serta distribusi pendapatan atau pendapatan daerah (Tarigan, 2014:27).

Sektor pengadaan gas dan listrik didefinisikan sebagai suatu indikator untuk memerhatikan kemajuan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan cara mengukur semua sektor yang ada di dalam data PDRB baik berdasarkan harga berlaku atau harga konstan (Setiawan, 2020:38). Dua bagian dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku dan sektor pengadaan gas dan listrik berdasarkan harga berlaku adalah total nilai tambah suatu produk yang ditentukan oleh harga yang berlaku untuk tahun tersebut. Sektor pengadaan gas dan listrik adalah pajak atas pelayanan yang disediakan pemerintah daerah.. sektor pengadaan gas dan listrik termasuk pemungutan sektor pengadaan gas dan listrik, maka pemerintah daerah dapat terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang sektor pengadaan gas dan listrik

Konsep Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Nurcholis (2017:182) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Menurut Halim (2014:67) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sedangkan menurut Yani (2014:51) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil daerah lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Sabirin (2013:37) mengatakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah penambahan kas pemerintah yang berasal dari berbagai sumber antara lain mencakup penerimaan pajak, cukai, penerimaan minyak, pendapatan yang berasal dari investasi, penerimaan bantuan luar negeri dan pinjaman dalam negeri serta hibah.

METODE

Sumber Data

Data primer merupakan data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Data pokok dapat dideskripsikan sebagai sumber data yang diperoleh langsung dari tangan pertama subjek penelitian seperti pernyataan orang perorang yang paham terhadap sektor pengadaan gas dan listrik dan sumber

pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju pada tempat penelitian pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju; dan

Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh tidak melalui tangan pertama, melainkan melalui tangan kedua, ketiga atau seterusnya merupakan data yang diperoleh melalui pencatatan dokumen-dokumen yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Observasi (pengamatan) merupakan aktivitas dari suatu proses atau objek untuk merasakan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena yang terjadi secara langsung, berdasarkan pengetahuan atau gagasan yang telah diketahui sebelumnya, dan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan guna melanjutkan suatu penelitian;

Studi kepustakaan merupakan segala usaha yang dilakukan oleh penulis untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, jurnal ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain;

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadaan Gas dan Listrik Kabupaten Mamuju

Gas dan kelistrikan menjadi salah faktor pendorong perekonomian di Kabupaten Mamuju sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan perwujudan rasio elektrifikasi mencapai 100%. Menurut BPS, rasio elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari gas dan listrik dengan total jumlah rumah tangga. Tercapainya rasio elektrifikasi 100% menunjukkan bahwa seluruh wilayah di daerah telah dialiri listrik dan terpenuhi kebutuhan pasokan gas. Masih terdapat beberapa daerah di Kabupaten Mamuju rasio elektrifikasinya di bawah rata-rata kebutuhan gas dan listrik. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab belum meratanya pengadaan listrik dan pemenuhan kebutuhan gas di Kabupaten Mamuju, salah satunya adalah kondisi geografis Kabupaten Mamuju sebagai daerah yang menyulitkan distribusi pemerataan pemenuhan konsumsi gas dan energi listrik.

Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab menampung serta melaksanakan kegiatan perancangan, pembangunan, dan pengusahaan tenaga listrik di Kabupaten Mamuju telah membagi kelompok pengguna listrik ke dalam beberapa jenis pelanggan listrik, yaitu rumah tangga, industri, bisnis, sosial, gedung kantor pemerintahan, dan penerangan jalan umum hal ini secara tidak langsung menjadi isyarat bahwa pada tahun tersebut permintaan listrik, terutama di lingkungan rumah tangga, meningkat secara nasional. Dengan mempertimbangkan meningkatnya kebutuhan gas dan listrik Kabupaten Mamuju menjadi salah satu daerah Kabupaten dengan rasio elektrifikasi tertinggi pada tahun 2023. Berikut data penerimaan sektor gas dan listrik dalam PDRB Kabupaten Mamuju.

Tabel 1.

Laju Pertumbuhan Sektor Gas Dan Listrik Dalam Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mamuju (Dalam Milliar Rupiah)
Tahun 2018–2022

Tahun	Sektor Gas Dan Listrik (Milliar Rupiah)
2018	5.390.000.000
2019	5.460.000.000
2020	6.000.000.000
2021	5.830.000.000
2022	6.360.000.000

Berdasarkan tabel 1 penggunaan gas dan listrik sudah menjadi penunjang hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat. Sampai sekarang pemerintah Kabupaten Mamuju belum mampu memenuhi kebutuhan gas dan listrik untuk seluruh masyarakat. Pertumbuhan kebutuhan gas dan listrik masih jauh di atas pertumbuhan pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan konsumsi masyarakat Kabupaten

Mamuju sedangkan kebutuhan gas dan tenaga listrik menjadi salah satu komponen utama dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mamuju.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mamuju

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian dalam jangka panjang, dan pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena penting yang dialami dunia hanya dua abad belakangan ini. Kabupaten Mamuju melakukan upaya-upaya secara berkesinambungan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang meliputi pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara secara keseluruhan. Pembangunan yang dilakukan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, dan berkelanjutan guna meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah lain, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Mamuju maka dalam pelaksanaannya harus adil dan merata diseluruh daerah, agar setiap wilayah mengalami perkembangan pembangunan. Salah satu wujud pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses pertumbuhan output perkapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti, bahwa dalam jangka panjang, kesejahteraan tercermin pada peningkatan output perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat di Kabupaten Mamuju.

Indikator adanya peningkatan pendapatan suatu daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), karena Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan untuk mengetahui kinerja suatu perekonomian. Perubahan Relatif Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disebut sebagai pertumbuhan ekonomi. sangat berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki peran bagi penerimaan pemerintah daerah. Dimana produk domestik regional bruto adalah sejumlah nilai tambah produksi yang ditimbulkan oleh berbagai sektor usaha yang melakukan kegiatan usahanya disuatu daerah atau regional dalam satu kurun waktu tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan media utama bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumberdaya daerah secara optimal dan sebagai media untuk mengevaluasi prestasi pemerintah daerah dalam hal pembiayaan pembangunan di daerah.

Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal dengan peningkatan permintaan tidak dibarengi dengan tersedianya barang. yang memadai, maka keuntungan yang didapat dari permintaan masyarakat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tercermin pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Berikut data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mamuju dalam menopang pembangunan daerah.

Tabel 2.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Rupiah) Tahun 2018–2022

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Rupiah)
2018	10.999.830.000
2019	11.721.690.000
2020	11.700.060.000
2021	12.434.740.000
2022	13.380.490.000

Berdasarkan tabel 2 Produk Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mamuju merupakan total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah atau regional tertentu dan dalam kurun waktu tertentu selama lima tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah. Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku merupakan perhitungan nilai tambah barang dan jasa yang menggunakan harga tiap tahunnya;

Kontribusi Sektor Pengadaan Gas Dan Listrik terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mamuju Tahun 2018-2022.

Hasil dalam penelitian ini memberikan informasi terkait kontribusi sektor pengadaan gas dan listrik terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Mamuju Tahun 2018 – 2022, besarnya angka kontribusi dalam kurun waktu lima tahun terakhir sejak tahun 2018 sebesar 49,00%, tahun 2019 sebesar 46,58%, tahun 2020 sebesar 51,28%, tahun 2021 sebesar 46,88%, dan tahun 2022 sebesar 47,53%.

Dari hasil perhitungan kontribusi menunjukkan adanya tren positif sektor gas dan listrik terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Mamuju, hal ini berarti pula bahwa semakin tinggi ketersediaan pasokan gas dan listrik maka kebutuhan masyarakat di Kabupaten Mamuju makin terpenuhi baik untuk kebutuhan rumah tangga dan sektor industri dan jasa juga akan meningkat, sebaliknya jika ketersediaan pasokan gas dan listrik yang disiapkan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju rendah maka permintaan akan gas dan listrik akan meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan observasi penelitian ini dapat dikemukakan bahwa dilihat dari faktor ketersediaan dan pasokan gas dan listrik di Kabupaten Mamuju menunjukkan perilaku positif dan sebagian lagi terdapat permasalahan pemadaman listrik secara bergiliran di setiap wilayah dimungkinkan karena pelanggan yang belum begitu mengerti cara pemakaiannya, kesalahan teknisi dalam pemasangan, atau disebabkan karena kualitas perangkat meteran yang kurang baik, hal ini dapat dikatakan demikian mengingat bahwa ketersediaan listrik prabayar merupakan jenis pelayanan yang relatif masih baru sehingga masih terdapat permasalahan-permasalahan yang belum diketahui sebelumnya.

Masih terdapat kekecewaan masyarakat akan suplai gas dan listrik disebabkan karena teknisi yang kurang tanggap dalam menanggapi keluhan masyarakat, salah satu masyarakat bahkan ada yang mengemukakan bahwa ketika masyarakat melapor karena meterannya bermasalah, pegawai teknisi justru malah saling lempar dan menyarankan untuk menghubungi nomor telepon teknisi yang lain, ketika masyarakat menghubungi teknisi yang disarankan tersebut, pelanggan di lempar lagi untuk menghubungi teknisi yang lain lagi, sehingga masyarakat kebingungan dan menunggu seharian sampai meterannya diperbaiki.

Permasalahan tersebut dimungkinkan karena hanya pembagian volume listrik kelas menengah kebawah merasa kesulitan ketika harus membaca dan menginput kode digit angka dan kebingungan membaca indikator yang ditampilkan di meteran prabayar. Sedangkan ketersediaan gas dirasakan lagi oleh masyarakat di Kabupaten Mamuju terkadang mengalami kelangkaan sehingga masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan yang awam menjadi kebingungan ditambah rasa was-was, takut tidak mendapatkan suplai gas untuk kebutuhan rumah tangga, jika tidak tertangani dengan baik maka akan menjadi masalah sosial yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Mamuju.

Pembahasan diatas sesuai dengan teori yang dikemukakan Menurut Sirojuzilam (2018:16) mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran konteks pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan Gandi, A. M (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh PDRB Sektor Pengadaan Listrik Dan Gas Terhadap Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2020”. Hasil penelitiannya terdapat kontribusi yang positif Pengaruh PDRB Sektor Pengadaan Listrik Dan Gas Terhadap Domestik Regional Bruto (PDRB).

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan kontribusi sektor pengadaan gas dan listrik terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Mamuju Tahun 2018 – 2022, di mana tahun 2018 berkontribusi sebesar 49,00%, tahun 2019 berkontribusi sebesar 46,58%, tahun 2020 berkontribusi sebesar 51,28%, tahun 2021 berkontribusi sebesar 46,88%, dan tahun 2022 berkontribusi sebesar 47,53%.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad Lincoln, (2014). Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Ekastruti, Z. (2020). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Bumh Sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin Periode Tahun 2014-2018.
- Gandi, A. M. (2020). Pengaruh Pdrb Sektor Pengadaan Listrik Dan Gas Terhadap Pdrb Adhk Di Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2020. *AGREGATE*, 3 (1), 54-64.
- Halim Abdul, (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah. Jakarta: Selemba Empat
- Mardiasmo, (2013). Perpajakan Edisi Revisi Cetakan Kedua. Yogyakarta : Penerbit Andi Offcet
- Marihot, Siahaan Pahala, (2010). Hukum Pajak Elementer. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mulyadi, (2011). Sistem Akuntansi Dalam Perpajakan. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Nurcholis Hanif, (2017). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta : penerbit Erlangga
- Purwono, (2014). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Jogyakarta : Andi, Yogyakarta
- Raharjo, (2014). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Elek Media Komputindo, Kelompok Gramedia
- Riantika, I. B. A., & Utama, M. S. (2017). Penentuan Prioritas Pembangunan Melalui Analisis Sektor-Sektor Potensial Di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(7), 165301.
- Sabirin, (2013). Perpajakan Pertambahan Nilai. Yogyakarta : Penerbit Andi Offcet
- Sambodo, (2014). Aspek-aspek Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jakarta: Bina Aksara
- Siahaan, Santi R, (2013). Pengantar Ekonomi pembangunan. Medan: Universitas HKBP Nommensen
- Sirojuzilam, 2018. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia
- Soemitro, (2014). Asas dan Dasar Perpajakan. Bandung : Penerbit Refika Aditama
- Sugiyono, (2012). Memahami Penelitian Kuantitatif. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Sumber Keuangan Daerah Yang Digali Dari Wilayah Daerah Yang Bersangkutan Yang Terdiri Dari Hasil Pajak Daerah
- Utomo, D. S. (2022). Analisis Tingkat Kesehatan Aspek Keuangan Perusahaan BUMN Sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin Untuk Periode Tahun 2017-2020 (Doctoral Dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Waluyo (2013). Penerapan Sunset Policy Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jalarta Cilandak. Unikom
- Zain, (2012). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Sektor pengadaan gas dan listrik Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Universitas Gunadarma